

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI DAN ISTRI
YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH
PERKAWINAN SEBELUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO: 69/PUU-XIII/2015

(Studi: Terhadap Putusan PN Jakarta Timur Nomor :2173/Pdt.P/2012
dan Nomor : 459/Pdt/P/2007

TESIS
Disusun Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



Disusun Oleh:

Rido Cipta

1520123067

Dosen Pembimbing:
Dr.Mardenis S.H,Msi
Linda Elmis S.H,M.H

Program PascaSarjana Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Padang

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI DAN ISTRI YANG
MELAKUKAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN
SEBELUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 69/PUU-XIII/2015**

ABSTRAK

Perjanjian kawin merupakan salah satu alternatif yang dipersiapkan dalam perkawinan oleh calon suami-istri yang ingin membatasi hak dan kewajiban khususnya mengenai harta. Pada ayat 1 Pasal 29 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dengan jelas disebutkan bahwa perjanjian kawin tersebut harus dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, diatur juga didalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu disebutkan bahwa perjanjian kawin haruslah dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperkenankan dilakukannya perjanjian kawin setelah melakukan perkawinan. Akan tetapi sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menambah diktum Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan tetap sah secara hukum. Masalah yang dapat dirumuskan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan perjanjian kawin setelah perkawinan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan Putusan PN Jakarta Timur nomor: 2173/Pdt.P/2012 dan nomor : 459/Pdt/P/2007 serta akibat hukumnya dari perjanjian kawin tersebut.

Dengan menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) mendapatkan informasi dari dokumen-dokumen. Perlindungan para pihak dari perjanjian kawin setelah perkawinan meliputi adanya kepastian hukum mengenai pembagian harta Menghindari kesalahpahaman terhadap pemisahan harta. Mempermudah penyelesaian konflik rumah tangga, akibat hukumnya yang ditimbulkan yaitu sebagai suatu perjanjian yang telah dikuatkan secara yudisial oleh penetapan pengadilan. Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Adanya Penetapan Pengadilan, pembagian harta yang diatur dalam perjanjian kawin tersebut semakin kuat dengan kata lain segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan didalam perjanjian kawin.

Kata kunci: Perjanjian kawin, perlindungan hukum, dan akibat hukum

**LEGAL PROTECTION AGAINST HUSBANDS AND WIFE THAT DOING A
MARRIAGE AGREEMENT AFTER THE MARRIAGE BEFORE THE
CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION NUMBER: 69 / PUU-XIII / 2015**

ABSTRACT

The marriage agreement is one alternative that is prepared in marriage by prospective husband and wife who want to limit their rights and obligations specifically regarding property. In section 1 of Article 29 of the Marriage constitution number of 1 Year 1974 clearly stated that the marriage agreement must be carried out at the time or before the marriage is held, regulated also in Article 147 of the Civil Code, namely that the marriage agreement must be made with a notary deed and must was made before the marriage took place. In 2015 the Constitutional Court issued Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 which permitted the agreement to marry after marriage. However, before the issuance of the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 which adds to the dictum of Article 29 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, marriage agreements made after marriage remain legally valid. Problems that can be formulated are concerning legal protection for husband and wife who make a marriage agreement after marriage before the issuance of the Constitutional Court Decision Number: 69 / PUU-XIII / 2015 is associated with the East Jakarta District Court Decision number: 2173 / Pdt.P / 2012 and number: 459 / Pdt / P / 2007 as well as the law is from the marriage agreement.

By using a normative juridical approach, namely the approach through library research (library research) to obtain information from documents. Protection of parties from marriage agreements after marriage includes legal certainty regarding the distribution of property Avoiding misunderstandings regarding the separation of property. Facilitating the resolution of household conflicts, the legal consequences that arise are as an agreement that has been judicially strengthened by the establishment of a court. not only regulating the cause and effect of marriage after marriage, but also on third parties. With the establishment of a court, the distribution of property regulated in the marriage agreement is stronger in other words all matters relating to the separation of property are clearly separated in the marriage agreement.

Keywords: Agreement on marriage, legal protection, and legal consequences

